

**PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI KECAMATAN  
KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ANNISA MAULANA GANDA SARI**

**90100114076**

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISA MAULANA GANDA SARI

NIM : 90100114076

Jur/Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Strata I

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam/Strata I

Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo, Samata.

Judul : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2019

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K  
**Annisa Maulana Ganda Sari**  
**(90100114076)**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah"** yang disusun oleh **Annisa Maulana Ganda Sari** NIM: 90100114076, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munagasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 M bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Samata, 30 September 2019 M.  
01 Shafar 1441 H.

### DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
Sekretaris : Prof. Dr. IL Muslimin Kara, M.Ag.  
Pengujil : Dr.Hj. Rahmawati Maul, M.Ag.  
Penguji II : Memen Suwandi, S.E., M.Si.  
Pembimbing I : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
Pembimbing II : Sirajuddin, S.Ei., M.E

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar  
  
Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19681130 199303 1 003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi al-Alamin, Puji syukur kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis yang sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan rahmatan lilalamin.

Penulisan skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, baik secara material maupun moral. Oleh karena itu Penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih setulus-tulusnya, terutama kepada Ayahanda tercinta bapak Suherno dan Ibunda tersayang Ti’at Nurhaeni yang telah berkorban dengan rasa kesabaran dan keikhlasan mencurahkan perhatian, memelihara, membimbing dan mendidik penulis sejak kecil hingga menjadi manusia yang lebih mengerti akan perjuangan untuk hidup menjadi lebih baik. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada Kakanda tersayang Mas Maulana Yusuf dan Dian Resdiana beserta keluarga yang banyak membantu berupa materi dan perhatian serta semangat sehingga keberhasilan ini dapat dicapai.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada orang-orang yang telah mendo'akan, membantu dan mendukung serta membimbing penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Berikut terimakasih kepada segenap pihak yaitu:

1. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Ucapan terimakasih pula kepada Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Terimakasih juga kepada Dr. Hj. Rahmawati Mu'in, M.Ag., sebagai Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam dan selaku penguji I, serta kepada Drs. Thamrin Logawali, M.H., selaku sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada bapak Drs. Urbanus Uma Leu M.Ag., selaku pembimbing I, dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan bimbingan yang cukup berarti dan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama bimbingan, Terimakasih yang tak terhingga pula penulis haturkan kepada bapak Sirajuddin S.EI, M.E., selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi



ini dan selalu memberikan semangat serta tantangan kepada penulis untuk menjadikan skripsi ini sebagai tulisan yang baik.

5. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada Memen Suwandi, SE. M.Si., sebagai penguji II, dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama ujian.
6. Terimakasih penulis haturkan pula kepada segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati serta Staf Tata Usaha Akademik dan Staf Jurusan yang telah memberikan pelayanan maksimal sejak memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar sampai akhir studi.
7. Ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada bapak Arifuddin selaku staf kantor Kecamatan Karossa, kepada para petani sawit, pengusaha dan masyarakat Karossa yang meluangkan waktunya dengan suka rela memberikan kesempatan sebagai narasumber utama dalam proses pengumpulan data dan wawancara demi tuntasnya penyelesaian skripsi ini.
8. Salam kompak untuk semua teman-teman seperjuangan: Nurmaidah, Cica, Irawati, Suci Awaliah, Marya Ulfa, Elvina. L, Aminah Fatimah Adzahra, Rista dan Waode Jihani yang selalu memberikan dorongan semangat yang tidak pernah putus saat kuliah dan memberikan masukan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi. Tidak lupa pula untuk Teman-teman Jurusan

Ekonomi Islam Kelas B dan angkatan 2014 yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu namanya.

9. Terlebih dari itu penulis haturkan terimakasih kepada seluruh teman-teman alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum angkatan 2014, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang selalu memberikan motifasi dan semangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Terimakasih pula kepada teman-teman se-Posko pada KKN Angkatan 58 di Desa Bontotangga Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa yang banyak memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis.
11. Terlebih lagi terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dorongan untuk tetap menuntut ilmu hingga saat ini dan kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis yang hanya karena keterbatasan ruang hingga tidak dapat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah swt memberikan rahmat, rezeki dan inayah-Nya kepada orang-orang yang berjasa kepada penulis serta telah mendo'akan dan membantu penulis. Semoga diberikan balasan yang berlipat ganda dan mendapat balasan yang lebih baik di sisi Allah *azza wa jalla*. Aamiin.

Samata-Gowa, Oktober 2019  
Penulis,

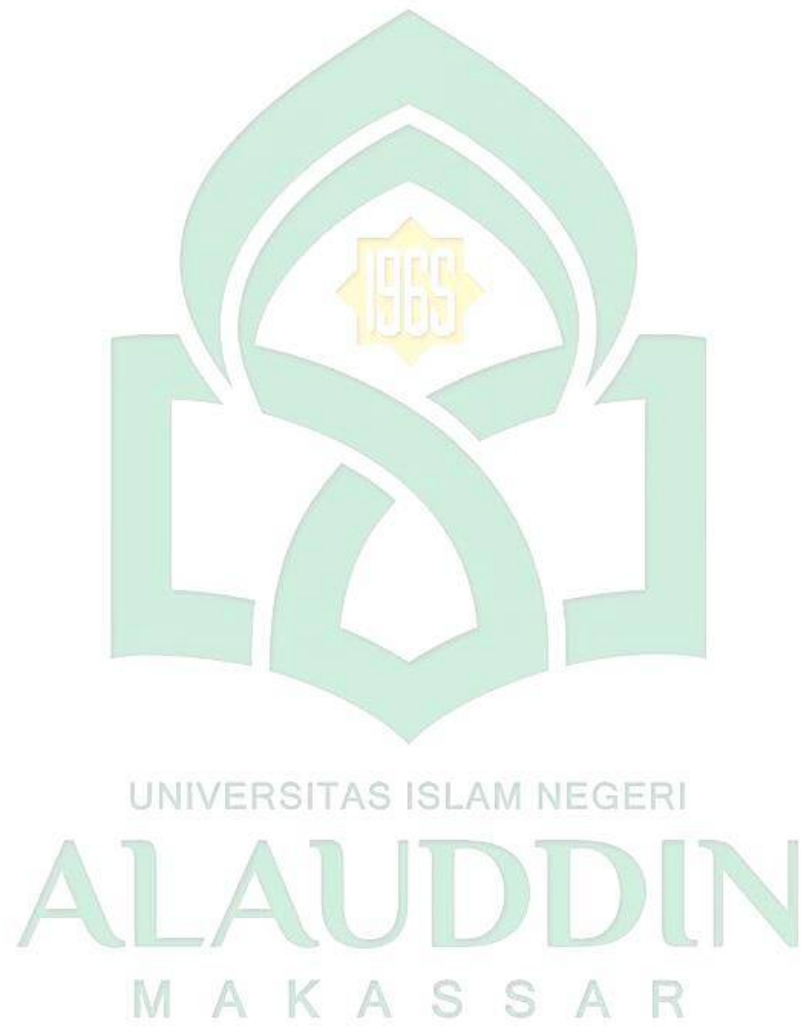
**Annisa Maulana Ganda Sari**  
**90100114076**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-15
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Penelitian Terdahulu .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17-31
A. Definisi Gadai .....	17
B. Dasar Hukum Gadai .....	18
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	20
D. Pemanfaatan Barang Gadai .....	22
E. Berakhirnya Akad Gadai .....	26
F. Riba .....	27
G. Kerangka Pikir .....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32-36
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Jenis dan Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	35
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
BAB IV PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI KECAMATAN KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH.....	37-70
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	37
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	43
BAB V PENUTUP.....	72-73

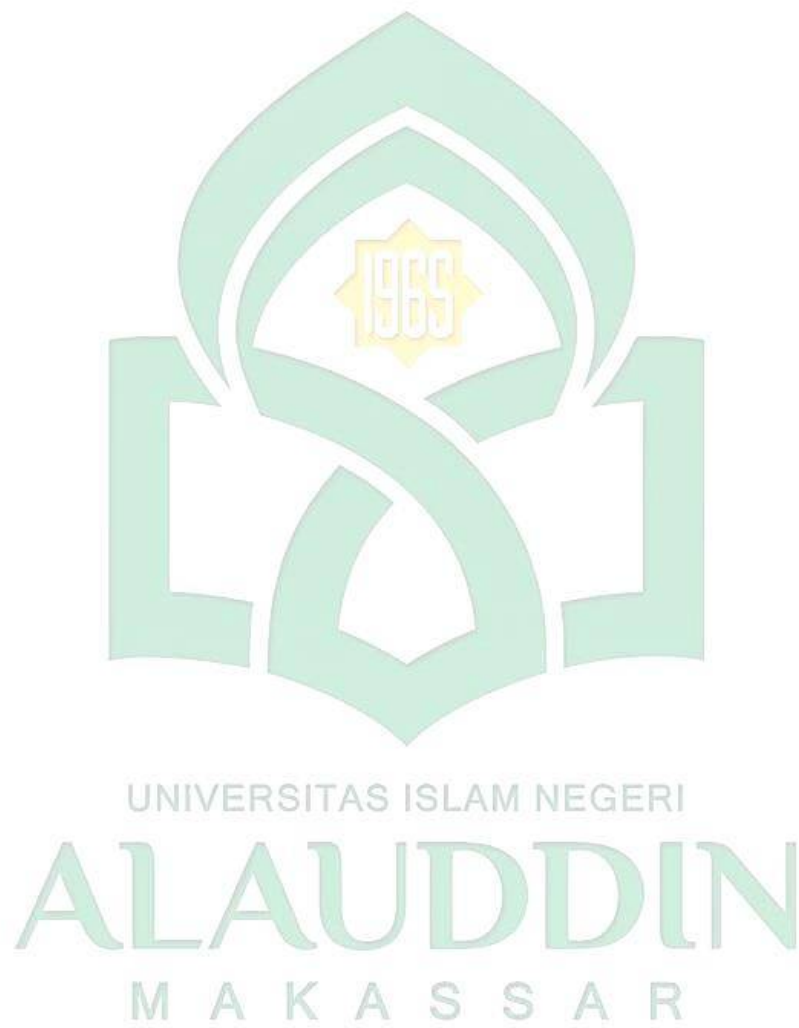


A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100



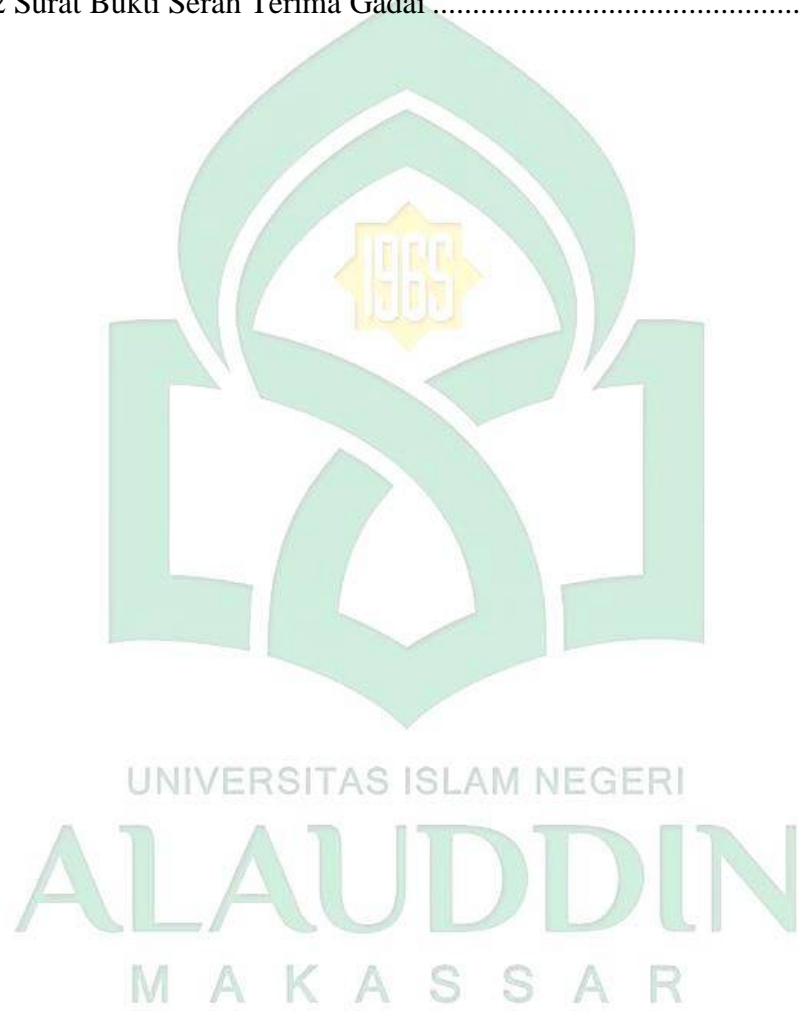
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Desa/UPT dan Jarak dari Ibu Kota Kecamatan.....	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Karossa .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	29
Gambar 4.1 Diagram Presentase Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Desa.....	41
Gambar 4.2 Surat Bukti Serah Terima Gadai .....	59



## ABSTRAK

Nama : ANNISA MAULANA GANDA SARI

Nim : 90100114076

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa  
Kabupaten Mamuju Tengah.

---

Pokok masalah dalam penelitian adalah tindakan *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipijamkan kepada rahin, berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka memunculkan sebuah pertanyaan Apakah tindakan *murtahin* dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dibolehkan menurut hukum ekonomi Islam?

Jenis penelitian tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pendekatan studi kasus dan Syar'i Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis data dengan cara: Reduksi data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak *murtahin* adalah hukumnya dibolehkan karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan barang gadai yang mendatangkan keuntungan atau nilai tambah kepada *murtahin* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk riba dan mendzalimi rahin.

**Kata Kunci: Barang Gadai, Murtahin, Nilai Tambah.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kegiatan ekonomi merupakan kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezki dan dengan rezki itu digunakan untuk melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi yang berkebenaran absolut, sunnah rasullah berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis merangsang manusia untuk rajin dan giat berkerja, maka kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, tapi tidak semua kegiatan ekonomi di benarkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila semua kegiatan itupunya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebahagian kecil orang seperti monopoli dagang, calo, penjudi, dan riba pasti akan di tolak oleh Islam.<sup>1</sup>

Melihat kondisi perekonomian yang terjadi sekarang yang tidak menentu, maka sebagian banyak orang berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian rumah tangga mereka. Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan yang bersifat ekonomi. Persoalan ekonomi yang membelit dalam masyarakat adalah Kemiskinan yang seakan menjadi lingkaran setan dan tingkat pengangguran yang tinggi.

---

<sup>1</sup>M. Zuhri, *Riba Dalam al- Qur'an dan Masalah Perbankan* (Cet. II; Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.



Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena social tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang pembangunan ekonomi.<sup>2</sup>

Adapun pada umumnya masyarakat selalu ingin mendapatkan penghidupan layak setiap harinya, sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak pekerjaan yang sering dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seperti: bertani, berdagang, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sering merasa tidak cukup dengan pendapatan yang diterimanya dari hasil kerja mereka. Hal inilah yang membuat naluri manusia untuk mencari pinjaman kepada pihak-pihak yang diyakininya dapat memberikannya.

Pemberian pinjaman itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.<sup>3</sup> Namun untuk ketenangan hati dan untuk menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan dalam hal memberikan pinjaman, Pihak pemberi pinjaman tidak secara serta merta langsung memberikan uang pinjaman kepada pihak peminjam juga boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila *rahin* itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah

---

<sup>2</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 9.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Edisi I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 227.

ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh *murtahin*. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai dapat menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat ini, para ulama fiqih sepakat bahwa menanggukkan suatu benda sebagai jaminan atas utang itu diperbolehkan. Sebab hal ini bersifat jaminan saja dan terjadi jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, firman Allah *farihanu maqbudhoh* pada ayat tadi merupakan sebuah anjuran baik kepada orang yang beriman.<sup>5</sup>

Konsep jaminan tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*,<sup>6</sup> gadai (*rahn*) secara bahasa adalah “*ats-tsubut wa ad-dawam*” yang berarti tetap dan kekal, seperti kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 61.

<sup>5</sup>Abdur Rahman Gazali, DKK, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 266.

<sup>6</sup>Muhammad Solikhu Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3

Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu* yang berarti penahanan.<sup>7</sup> Secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.<sup>8</sup> Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa *rahn* atau gadai adalah jaminan atau penahanan suatu harta atau barang atas utang piutang sehingga jika utang dapat dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya. Adapun dalam masalah gadai (*rahn*), Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa ulama fiqih dapat dijumpai dalam beberapa kitab-kitab fiqih, baik mengenai rukun gadai yang diantaranya *rahin* (orang yang menggadaikan barang), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (utang). Maupun syarat, dasar hukum dan pemanfaatan barang gadai yang pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157.

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>9</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 147.

Ulama fiqih sepakat apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat tanah yang dipegang oleh murtahin. Namun, dalam pelaksanaannya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan barang jaminan (gadai) dari aturan yang telah ada. Pada penelitian ini barang yang digadaikan (yang dijaminkan) berupa tanah (kebun kelapa sawit) dalam praktiknya yang terjadi dilokasi bahwa barang gadai tersebut dimanfaatkan (hasil panen dikuasai) oleh murtahin. Hasil kebun kelapa sawit yang merupakan sumber pendapatan pokok pihak keluarga rahin digunakan sebagai barang jaminan yang masih dalam proses penggadaian ini memberikan dampak kepada rahin

Dampak yang dirasakan oleh rahin ada yang bersifat positif dan negatif, yang bersifat positif yakni rahin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari murtahin untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Adapun dampak negatif yang didapatkan adalah rahin kehilangan pendapatannya karena ia tidak mendapatkan lagi hasil dari panen lahan kelapa sawit miliknya dan akan mempersulit rahin dalam membayarkan utangnya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu

yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadaikan.<sup>10</sup>

Adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin adalah ia memperoleh hasil dari panen lahan kelapa sawit milik murtahin selama akad gadai masih berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang rahin membayar sesuai dengan jumlah yang pertama kali ia pinjam kepada pihak murtahin tanpa dikurangi dengan hasil panen yang diterima oleh murtahin dari lahan kebun kelapa sawit milik rahin. Hal ini membuat murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin dan ditambah dengan jumlah uang yang didapatkan dari hasil panen lahan kelapa sawit selama masa penahanan barang dan bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak murtahin dianggap sebagai nilai tambah. Setiap keuntungan atau tambahan dalam utang piutang adalah riba, sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya:

Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada kreditor itu termasuk riba.<sup>11</sup>

Ulama Hanbaliyah berpendapat apabila barang yang digadaikan merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan karena barang gadaian dan

<sup>10</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h.201.

<sup>11</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, h. 11



apa yang dihasilkan milik pihak yang menggadaikan.<sup>12</sup> Apabila barang yang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizin penggadai.<sup>13</sup> Adapun, menurut Ulama Malikiyah pihak murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Pemanfaatan Barang gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.**

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tindakan murtahin yang memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipijamkan kepada rahin. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan syar'i normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

---

<sup>12</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*(Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss, 2016) h. 201.

<sup>13</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.160.

<sup>14</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h.270.

## 2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam tindakan *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai dan memperoleh keuntungan atau nilai tambah atas pemanfaatan barang gadai terhadap nominal uang yang dipinjamkan kepada *rahin*.

Adapun gambaran praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat ini dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat medesak dan memerlukan dana secepatnya, sedangkan satu-satunya barang yang dimiliki dan memiliki nilai ekonomis yang dapat dikatakan lumayan tinggi adalah dengan menggadaikan kebun sawit mereka. Sedangkan proses gadai kebun kelapa sawit sangat sederhana dengan datangnya si A yang akan menggadaikan kebun kelapa sawitnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman.

Masyarakat di Kecamatan Karossa biasanya menggadaikan kebun kelapa sawitnya kepada kerabatnya ataupun kepada tetangganya sendiri dengan waktu pengembalian yang ditentukan. Selama *rahin* belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula *murtahin* berhak atas penggarapan kebun kelapa sawit tersebut, yang pada kenyataannya kelapa sawit dipanen 3 kali dalam satu bulan dan apabila hal ini berlangsung selama setahun waktu perjanjian gadai, maka pihak *murtahin* dapat memperoleh nilai yang lebih atas uang yang *murtahin* pinjamkan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Apakah tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dibolehkan menurut hukum ekonomi Islam?

### **D. Penelitian Terdahulu**

Data atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

1. Penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus di Dusun Cipuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*. Penelitian ini dilakukan oleh Zia Ulhaq mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam 2014.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang akad dan pemanfaatan barang gadai berupa tanah sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah dan pemanfaatan terhadap jaminan gadai berupa tanah sawah yang ada di Dusun

---

<sup>15</sup>Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran?

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interview ataupun wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu dengan mengkaji data yang ada di masyarakat di Dusun Cirapuan untuk kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang gadai, tanpa memperhatikan hak penggada selaku pihak yang memiliki tanah tersebut.

2. Penelitian kedua dengan judul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah 2004.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang masalah dan mudasah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik gadai tanah serta

---

<sup>16</sup>Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004)

pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan?

Data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah sesuai dengan masalah dan mafsadahnya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan hukum islam terhadap praktik gadai tanah dan pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Segirukun dan syarat praktik gadai yang terjadi telah sesuai atau betul, tetapi dari pemanfaatannya barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan hukum islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis ditinjau dari segi masalah dan mafsadah ternyata terdapat mafsadah atau mudhratnya bagi rahin walaupun rahin sudah merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, maka pemanfaatan



tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi di dalam masyarakat Bugis tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolelir.

3. Penelitian ketiga dengan judul Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Penggadaian) (Mengatasi Masalah dengan Masalah), oleh Andi Irfan mahasiswa UIN SUSKA Riau Fakultas Ekonomika dan Ilmu Sosial.<sup>17</sup> Penelitian ini berbentuk jurnal, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah praktik “Boroh” (penggadaian) yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Syari’at Islam?

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Teknik yang pertama kali digunakan adalah wawancara tidak terstruktur kemudian juga melakukan pengamatan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa gadai yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan masyarakat merasa bahwa praktik tidak terlalu penting sesuai dengan syariah. Dalam hal pemanfaatan barang gadai murtahin memanfaatkannya dan tidak melakukan pemeliharaan terhadap barang gadai (marhun), ketika rahin tidak dapat melunasi utangnya kepada murtahin maka marhun akan menjadi milik murtahin dan tidak adanya proses lelang yang sesuai syariah terhadap marhun tersebut.

---

<sup>17</sup>Andi Irfan, *Suatu Tinjauan Islam: Praktik “Boroh” (Penggadaian) (Mengatasi Masalah dengan Masalah)* (Riau: UIN SUSKA)

4. Penelitian keempat dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal). Penelitian dilakukan oleh Muhammad Jamroni mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, 2010.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian dilapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa banjaran jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad tidak sah. Terjadi kecacatan dalam akad, yaitu adanya syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai yang secara keseluruhan berpindah ketangan murtahin. Ulama setempat juga berbeda pendapat menanggapi masalah pemanfaatan marhun tersebut, ada ulama yang mengatakan pemanfaatan marhun tidak apa-apa dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan.

5. Penelitian kelima yaitu: Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologis Hukum Islam) diteliti oleh Lila Isnawati mahasiswa

---

<sup>18</sup>Muhammad Jamroni, *Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal)*(Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.<sup>19</sup> Penelitian ini berupa penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Apakah pemanfaatan barang jaminan tanah (sawah) oleh kreditur termasuk riba? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Dusun Brunggang Sagen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo melaksanakan gadai tanah?

Data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara (interview). Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang gadai sawah dalam kajian normatif dan sosiologis Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai sudah sah atau sudah bisa dikatakan benar, akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak murtahin secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan aturan syari'at Islam/ hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Qur'an. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya praktik gadai adalah: mayoritas

---

<sup>19</sup>Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sagen, Desa Krajan, kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologis Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

masyarakat yang tergolong ekonomi menengah kebawah, keinginan saling tolong menolong antar sesama, faktor permasalahan ekonomi yang mendesak.

Kelima penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur gadai dan pemanfaatan barang gadai. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Zia Ulhaq lebih condong pada kesesuaian atau tidaknya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat dan unsur-unsur yang terkandung pada pemanfaatan barang gadai. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Supriadi lebih condong mengkaji kepada mufsadah dan mashlahah tentang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat bugis. Adapun yang dilakukan oleh peneliti ketiga yakni Andi Irfan lebih condong kepada pengamatan praktik gadai dan disesuaikan dengan ketentuan Syari'at. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Muhammad Jamron ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dari segi objek penelitian dan analisis data ini ditekankan pada analisis hukum islam. Berbeda pula dengan yang dilakukan oleh Lila Isnawati, yang lebih condong kepada normatif dan sosiologis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya gadai sawah.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, kelima penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kelimanya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti lakukan, baik dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketetapan hukum ekonomi Islam terhadap tindakan murtahin dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Kegunaan penelitian ini adalah:

#### **1. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan bersifat ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi ekonomi dan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

#### **2. Kegunaan secara praktis**

##### **a. Untuk Penulis**

Penelitian ini berguna untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan penulis saat mengikuti perkuliahan. Khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan gadai.

##### **b. Untuk Rahin dan Murtahin**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para pihak yang melakukan transaksi gadai di Karossa Mamuju Tengah agar dapat menjalankan transaksi sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Definisi Gadai**

Gadai atau yang biasa dikenal dengan istilah *rahn*, Secara etimologis *rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawan* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'un rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinnah* artinya nikmat yang terus menerus/ kekal.<sup>20</sup> Secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.<sup>21</sup> Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>22</sup>

Gadai (*rahn*) dalam ilmu fiqh adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Menurut al-Qurtubi *rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberikan utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak

---

<sup>20</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 289.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 1

<sup>22</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 147.

<sup>23</sup>Irfan, *Hukum Transaksi dalam Lingkup Mazhab* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Perss, 2014), h.18.

pengutang melunasi utang tersebut. Sementara menurut Ibnu Qudamah rahn adalah barang yang dijadikan jaminan untuk utang agar pemberi jaminan dapat menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya.<sup>24</sup>

Senada dengan beberapa definisi rahn yang telah dijelaskan sebelumnya, kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjual sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (rahn). Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan membayar maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang jaminan.

---

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 192.

<sup>25</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 192.

## B. Dasar Hukum Gadai

### 1. Al-Qur'an

Legitimasi gadai/rahn dalam al-Qur'an adalah berdasarkan surah al-Baqarah

(2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ  
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai dapat menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>26</sup>

### 2. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Dari Asy'ah r.a sesungguhnya rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang yahudi dalam waktu tertentu dengan menggadaikan baju besi. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadis ini, para ulama fiqih sepakat bahwa gadai (rahn)

diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan jika kedua

belah pihak saling mempercayai, firman Allah *farihanu maqbudhoh* pada ayat ini

<sup>26</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002) h. 61.

merupakan anjuran baik kepada orang yang beriman, sebab lanjutan ayat tersebut dinyatakan akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).<sup>27</sup>

### 3. Ijma' Ulama

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa gadai boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi pinjaman secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang jaminan dalam status *marhun*. Misalnya, barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tersebut.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu:

1. Rahin dan murtahin; rahin yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang. Adapun murtahin adalah orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
2. 'Aqdu adalah akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi rahn.
3. Marhunbih adalah uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.
4. Marhun adalah barang atau harta yang dijadikan jaminan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqih Muamalah*, h. 266.

Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun rahn adalah ijab dan kabul dari rahin dan murtahin.<sup>29</sup> Menurutnya, untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, maka diperlukan adanya pengusaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*almarhun*) dan utang (*almarhunbih*) hanyalah termasuk syarat saja bukan rukun.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat dari gadai (rahn) para Ulama fiqih menyusun sesuai dengan rukun gadai. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (*rahin dan murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.<sup>31</sup> Adapun dalam pasal 330 KHEs menyebutkan bahwa cakap hukum yang dimaksudkan berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah kedua belah pihak tidak harus baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>Irfan, *Hukum Transaksi dalam Lingkup Mazhab*, h. 20

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 195.

<sup>30</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

<sup>31</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

<sup>32</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 195.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

2. Syarat yang terkait dengan akad ('aqdu), ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang.<sup>34</sup>
3. Syarat yang berkaitan dengan utang (marhun bih) adalah, *pertama*: utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. *kedua*: utang itu boleh dilunasi dengan jaminan,<sup>35</sup> dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan.<sup>36</sup> *ketiga*: utang itu jelas dan tertentu.<sup>37</sup> Kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh rahin, utang harus mengikat kedua belah pihak, jumlah ukuran dan sifat utang harus jelas antara para pihak yang berakad.<sup>38</sup>
4. Syarat yang terkait dengan barang jaminan (marhun), menurut kesepakatan ulama adalah (1) Barang yang dijadikan harus benar-benar ada dan nyata. (2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal dapat dimiliki dapat disimpan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. (3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik secara

---

<sup>34</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

<sup>35</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 268.

<sup>36</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 196.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 268.

<sup>38</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 196.



sah dan kepemilikan sempurna. (4) Objek harus diserahkan pada saat transaksi.

(5) Barang yang digadaikan harus tahan lama.<sup>39</sup>

#### **D. Pemanfaatan Barang Gadai**

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadai, diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin (penggadai)
  - a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahin (penggadai) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin murtahin (penerima gadai). Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad saw:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمَهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ<sup>40</sup>.

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-Syafi'yah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah)

- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikan apapun jenis dan bentuk barang tersebut baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya. Kecuali, penerima gadai mengizinkannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 195.

<sup>40</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, h.291

<sup>41</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 269.

- c. Ulama Hanbaliyah berpendapat senada dengan Hanafiyah Pihak penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian kecuali dengan izin pihak penerima gadai.<sup>42</sup>
- d. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan kepada penerima gadai akan membatalkan gadai.<sup>43</sup>

## 2. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai)

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan atau menguntungkan pihak yang menggadaikan.<sup>44</sup>
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak *murtahin* (penerima gadai) boleh memanfaatkan barang gadaian jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan apabila utang dalam akad gadai adalah utang jual beli. Bila utang qard maka tidak diperbolehkan.<sup>45</sup>
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai apapun bentuknya, kecuali mendapat izin dari pemilik

---

<sup>42</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 199.

<sup>43</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 199.

<sup>44</sup>Abdul Rahman Gazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 201.

<sup>45</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 200.

barang. Apabila penerima barang memanfaatkannya tanpa izin, maka hukumnya sama dengan gasab.<sup>46</sup>

- d. Ulama Hanbaliyah berpendapat apabila barang yang digadaikan merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan karena barang gadaian dan apa yang dihasilkan milik pihak yang menggadaikan.<sup>47</sup> Apabila barang yang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizinkan penggadai.<sup>48</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis rasulullah saw sebagaiberikut:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.<sup>49</sup>

Artinya:

Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah.

<sup>46</sup>Ibnu 'Abidin, Hasyisah Radd Al-Mukhtar (Digital Library, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 364

<sup>47</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 201.

<sup>48</sup>RahmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2006), h.160.

<sup>49</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 2512

### ***E. Berakhirnya Akad Gadai***

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkannya barang gadai (borg) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya (rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo maka murtahin bisamenjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
4. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
5. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg diterima oleh murtahin.
7. Rusaknya borg. para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya borg.

8. Tindakan (tasaruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.<sup>50</sup>

Demikian uraian mengenai gadai (rahn), yang meliputi pengertian, dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, pemanfaatan barang, dan berakhirnya akad gadai.

#### **F. Riba**

Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba ringan dan riba berat. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah. Riba jual beli terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.<sup>51</sup>

Keempat riba tersebut adalah *Riba Qardh* adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh). *Riba jahiliyah* terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. *Riba nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari orang yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. *Riba fadhl* yaitu

---

<sup>50</sup>Wahba Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 288-289.

<sup>51</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 192.

pertukaran barang ribawi. Riba fadhhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.<sup>52</sup>

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaar dan terdapat hikma yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan suatu perkara tentu terdapat kemudharatan di dalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri.<sup>53</sup>

Adapun hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah: Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil; Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian diantara kaum muslimin; Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya; Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan; Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah penderitaan; Membuka pintupintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk

---

<sup>52</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, h. 94.

<sup>53</sup>Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press, 2008). h. 37.



mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutangnya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayangnya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan rasa persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.<sup>54</sup>

### ***G. Kerangka Pikir***

Perjanjian gadai yang terjadi adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak pelaku gadai yaitu rahin selaku pihak penggadai dan murtahin sebagai penerima gadai. Setelah kesepakatan disetujui oleh kedua belah pihak maka gadai dapat terlaksana. Tata cara pelaksanaan gadai yang terjadi sangat sederhana dengan datangnya rahin yang akan menggadaikan kebun kelapa sawitnya kepada si murtahin seseorang yang memberikan pinjaman. Selama rahin belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula murtahin berhak atas penggarapan kebun kelapa sawit tersebut.

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh murtahin yang ketika berlangsung dalam jangka waktu kesepakatan akad memberikan dampak kepada kedua belah pihak yakni murtahin dan rahin.

Dampak yang dirasakan oleh rahin ada yang bersifat positif dan negatif, yang bersifat positif yakni rahin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari murtahin untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi. Adapun dampak negatif yang

---

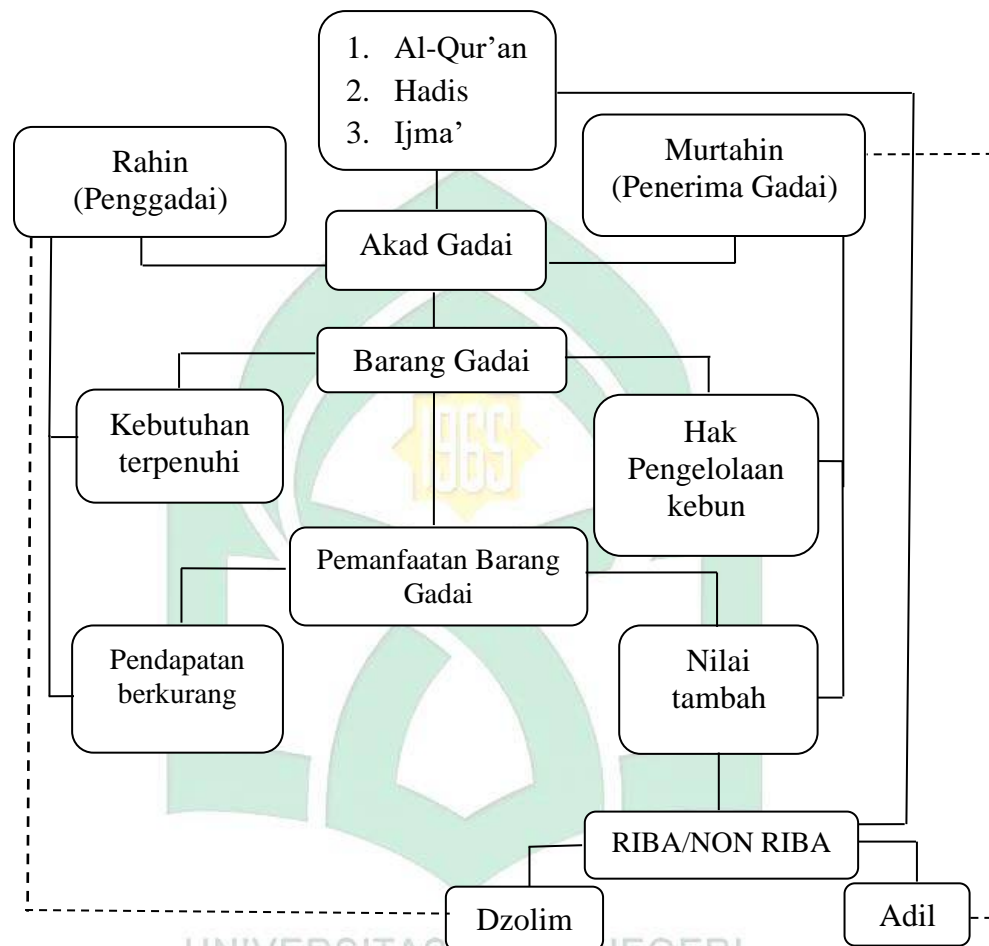
<sup>54</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 250.

didapatkan adalah rahin kehilangan pendapatannya karena ia tidak mendapatkan lagi hasil dari panen lahan kelapa sawit miliknya dan akan mempersulit rahin dalam membayarkan utangnya.

Adapun dampak yang dirasakan oleh murtahin adalah ia memperoleh hasil dari panen lahan kelapa sawit milik murtahin selama akad gadai masih berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang rahin membayar sesuai dengan jumlah yang pertama kali ia pinjam kepada pihak murtahin tanpa dikurangi dengan hasil panen yang diterima oleh murtahin dari lahan kebun kelapa sawit milik rahin. Hal ini membuat murtahin mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada rahin dan ditambah dengan jumlah uang yang didapatkan dari hasil panen kebun kelapa sawit selama masa penahanan barang dan bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak murtahin dianggap sebagai riba ataupun bukan riba.

Hal ini untuk lebih jelasnya akan dianalisis oleh penulis dengan cara membandingkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian dengan ketentuan nas al-Qur'an dan hadis serta ijma' para ulama fiqih, dan berdasarkan proses tersebut maka akan terjawabkan riba ataukah bukan riba pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin serta tindakan yang selama ini dilakukan oleh murtahin berupa hal yang dzolim ataupun hal yang bersifat menolong pihak rahin.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2.1  
Skema Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lainnya.<sup>55</sup> Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian Studi kasus dan Syar'i normatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>56</sup> Penelitian ekonomi Islam secara Syar'i maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk

---

<sup>55</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi II (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

<sup>56</sup>Creswell Jhon W, *Translate Design Research Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*, 2014, h. 11.

memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktek.<sup>57</sup>

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

Jenis data adalah lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh.<sup>58</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>59</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer yakni data hasil wawancara peneliti dengan pihak rahin, murtahin dan masyarakat karossa.
2. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari pihak lain yang telah lebih dulu mengumpulkannya sebagai penunjang dari sumber pertamanya.<sup>60</sup> Data ini berupa catatan-catatan, dokumentasi dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian.

---

<sup>57</sup>Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Pers, 2013) h.16.

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka, 2014), h. 14.

<sup>59</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93

<sup>60</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 94

Menurut Lofland dan Lofaln menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan.<sup>61</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori *in-dept interview*. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-denyanya.<sup>62</sup>

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan panca indra kita. Peneliti dapat melihat kondisi masyarakat yang menjadi lokasi penelitiannya menggunakan mata, telinga dan nalarnya untuk menghasilkan sebuah data penelitian.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989),h. 3.

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabetha, 2012), h.233

<sup>63</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Skunder*, h.86.



### ***E. Instrumen Pengumpulan Data***

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara. Adapun untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam dan kamera.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode, dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan. Adapun untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagaiberikut :

#### **1. Reduksi Data**

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam mereduksi data ini antara lain: mengumpulkan data dari informasi dari catatan hasil wawancara, serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.<sup>65</sup> Proses penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian naratif, seperti bagan dan diagram alur (*flow diagram*).<sup>66</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, dimaksudkan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

---

<sup>65</sup>Ariesto Hadi Supoto dan Andrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

<sup>66</sup>Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Edisi. I (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.215.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI KECAMATAN**  
**KAROSSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

**1. Letak Geografis Kecamatan Karossa**

Kecamatan Karossa adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Mamuju Tengah dan merupakan daerah wilayah kecamatan terjauh dari Ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah, jarak tempuh Kecamatan Karossa ke Kabupaten Mamuju Tengah adalah 70 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Secara geografis, Kecamatan Karossa terletak pada bagian utara Kabupaten Mamuju Tengah dan berposisi pada bentang Selat Makassar, yakni  $1^{\circ}47'82''$ - $2^{\circ}04'05''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}17'07''$ - $119^{\circ}24'08''$  Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Topoyo.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

**2. Gambaran Wilayah Kecamatan Karossa**

Kecamatan Karossa memiliki luas wilayah  $\pm 1.138,33$  Ha. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Karossa terdiri dari 11 Desa dan 2 Unit Pemukiman

Transmigrasi (UPT). Berikut tabel wilayah administrasi dan luas wilayah Kecamatan Karossa:

Tabel 4.1 Luas Desa /UPT dan Jarak dari Ibu Kota di Kecamatan Karossa.

No	Nama Desa/UPT	Luas (Ha)	Jarak dari Ibu kota Kecamatan (Km)
1	Kambunong	171,69	35
2	Tasokko	175,32	30
3	Salubiro	120,29	20
4	Lara	181,50	15
5	Sukamaju	11,29	13
6	Lembah Hopo	93,60	11
7	UPT Lara III	3,23	2
8	Karossa	280,44	0
9	Kadaila	15,36	2
10	Kayu Calla	8,75	3
11	Benggaulu	12,92	6
12	UPT Mora IV	13,63	7
13	Sanjango	50,27	17

*Sumber: Profil Kecamatan Karossa, 2018.*

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa desa yang memiliki luas wilayah yang paling luas adalah Desa Karossa dengan luas wilayah 280,44 Ha dan desa yang memiliki luas wilayah yang paling sedikit adalah Desa Sanjango dengan luas wilayah 50,27 H. Desa yang letaknya terjauh dari ibukota Kecamatan Karossa (Karossa) adalah Desa Kambunong yaitu sejauh 35 Km, dan Desa terdekat dari ibu kota Kecamatan adalah Desa Kadaila dan UPT Lara III yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kecamatan Karossa.<sup>67</sup>

<sup>67</sup>Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018) h. 6.

### 3. Kedaan Topografi dan Kemiringan Lokasi

Keadaan topografi di Kecamatan Karossa pada umumnya adalah daerah dengan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Karossa berprofesi sebagai petani atau pekebun karena kondisi cuaca yang mendukung untuk sektor tersebut.

Jika dicermati konfigurasi wilayah Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menurut kemiringan lereng, maka sebagian wilayah termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke timur secara graduasi juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit.<sup>68</sup>

### 4. Jumlah Penduduk

Sumber utama data kependudukan di Kantor Kecamatan Karossa adalah berasal dari setiap Desa di wilayah kecamatan karossa yang dilaksanakan setiap bulannya. Data dari desa tersebut berupa data mutasi kependudukan yang terjadi di setiap bulannya. Data tersebut kemudian kami rekapitulasi di Kantor Kecamatan Karossa sehingga jadilah data kependudukan kecamatan karossa. Secara keseluruhan jumlah penduduk masing-masing desa di Kecamatan Karossa. Jumlah penduduk Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah per bulan Februari 2018 adalah sebanyak 23.099 jiwa yang tersebar di 11 Desa dan 2 UPT. Dengan jumlah terbanyak berada di Desa Karossa dengan jumlah 5.133 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk

---

<sup>68</sup>Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018) h. 8.

paling sedikit adalah UPT Lara III dengan jumlah 325 jiwa. Sebagaimana tabel berikut:

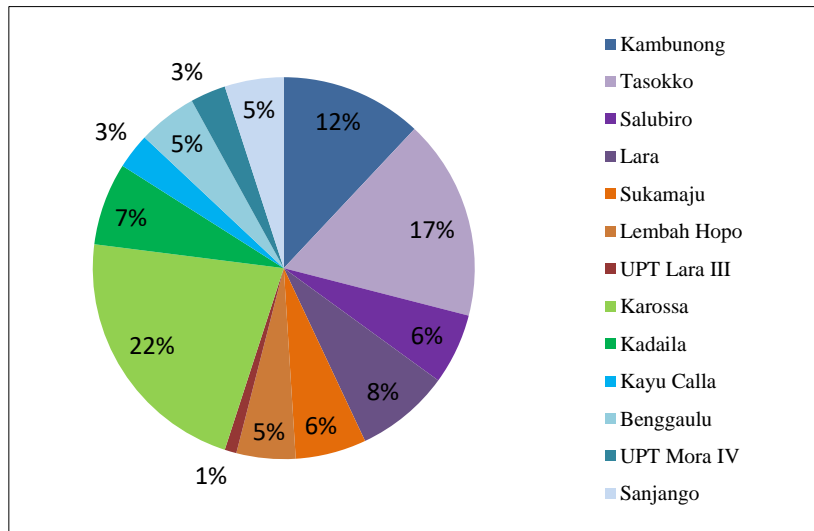
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Karossa Per Bulan februari 2018.

No	Nama Desa/UPT	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)
1	Kambunong	2.796	622
2	Tasokko	3.939	981
3	Salubiro	1.272	356
4	Lara	1.732	289
5	Sukamaju	1.345	213
6	Lembah Hopo	1.043	250
7	UPT Lara III	325	190
8	Karossa	5.133	873
9	Kadaila	1.603	412
10	Kayu Calla	746	201
11	Benggaulu	1.217	317
12	UPT Mora IV	804	183
13	Sanjango	1.144	254
Total		23.099	5.141

*Sumber: Profil Kecamatan Karossa, 2018*



Persentase jumlah penduduk di Kecamatan Karossa berdasarkan Desa dapat dilihat pada diagram berikut:



*Gambar 4.1*

*Diagram Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Desa*

Berdasarkan dari diagram diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak berada di Desa karossa dengan presentase besar 22% dan jumlah penduduk paling sedikit berada di UPT Lara III dengan presentase sebesar 1%.

## 5. Keadaan Sumber Daya Alam

Kecamatan Karossa terdiri dari daerah rawa dan lahan, masyarakat Kecamatan Karossa menggantungkan hidupnya dengan bertani, berkebun dan juga bekerja diperkantoran dan pabrik. Sawah adalah salah satu contoh pertanian yang ada di Kecamatan Karossa, petani di wilayah ini memulai penyemaian benih pada musim hujan sampai penanaman pada musim yang sama. rata-rata petani panen pada bulan Agustus jika keadaan musim normal, dan biasanya petani mengolah hasil panennya sendiri dikarenakan sebagian besar petani ini adalah perorangan bukan kelompok

(kelompok tani), tetapi ada juga sebagian kecil yang berkelompok seperti kelompok tani. Kecamatan Karossa untuk pertanian pada sawah terdapat di Desa Tasokko dan Salubiro, Lara dan Sanjango.<sup>69</sup>

Adapun dalam perkebunan, kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang menjadi unggulan di Kecamatan Karossa. Wilayah Kecamatan Karossa merupakan salah satu sentral produksi kelapa sawit yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Selain kelapa sawit masih banyak komoditi perkebunan lain seperti kakao, cengkeh, kelapa dalam, dan lainnya. Untuk lahan perkebunan, semua desa yang di wilayah Kecamatan Karossa memiliki lahan perkebunan terutama kebun kelapa sawit.<sup>70</sup>

Peternakan adalah salah satu komoditi yang hampir ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Salah satu contohnya adalah Desa Benggaulu yang masih banyak masyarakatnya yg berprofesi sebagai peternak baik itu kambing, sapi ataupun kerbau. Selain di desa Benggaulu, peternak ada juga di desa Kambunong.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018), h. 45

<sup>70</sup>Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018), h. 46

<sup>71</sup>Profil Kecamatan Karossa, (Karossa, 2018), h. 47

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Sejarah Gadai Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah**

Gadai merupakan akad transaksi yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas sejumlah utang. Praktik gadai kebun kelapa sawit di Kecamatan Karossa merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat yang awal mula praktik gadai ini tidak diketahui dengan pasti waktu terjadinya dan tidak diketahui pula orang yang memprakarsai gadai tersebut. Masyarakat hanya memperoleh berita secara lisan yang tidak diketahui pasti sumbernya, adapula masyarakat yang melakukan praktik gadai karena menirukan masyarakat kampung lain yang melakukan praktik gadai hanya saja mengganti objek barang gadai yakni dari sawah menjadi kebun kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan yang didapatkan penulis melalui wawancara dengan salah satu narasumber yakni Bapak Suherno (Rahin) yang mengatakan:

Dari mulut ke mulut, mendengarkan cerita, belajar dari kampung-kampung lain ada yang gadai dengan cara begini-begini. Namanya tradisional kebiasaan yang dijadikan pengalaman dari desa-desa tetangga.<sup>72</sup>

Jika ditilik seiring dengan sejarah dari awal mula masyarakat Karossa mulai melakukan penanaman kelapa sawit secara serentak yakni pada tahun 2006, penanaman sawit ini merupakan hasil kerja sama antara para kelompok petani dengan perusahaan PT. Surya Lestari 1 dengan resmi bibit kelapa sawit pada saat itu dijual

---

<sup>72</sup>Kutipan Wawancara Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00 WITA.

dengan harga 17.000 perpohon. Para kelompok tani pada tahun 2006 menanam pohon kelapa sawit rata-rata sampai 69 pohon dalam luas tanah 500 m<sup>2</sup> (0,5 Ha).

Buah kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan padat, masing-masing memiliki berat yang berbeda-beda dan setiap tandannya berisi begitu banyak buah sawit kecil-kecil. Pohon yang sehat akan menghasilkan 12 sampai 14 tandan buah setiap tahunnya. Setelah matang buah akan berubah menjadi berwarna orange kemerahan yang cerah, menunjukkan buah siap panen. Buah kelapa sawit dapat dipanen 1 kali dalam kurun waktu 10 hari. Pada saat pemanenan setiap 10 hari tersebut, tandan buah segar siap panen harus segera dilepaskan dengan menggunakan alat khusus untuk memanen yang bernama dodos. Namun, jika pohon kelapa sawit telah menjulang tinggi maka untuk melepaskan tandan buah kelapa sawit diperlukan alat yang berbeda yakni sabit panjang yang memungkinkan para pemanen harus terampil dalam menjangkau ketinggian letak tandan buah kelapa sawit. Ketika pemilik tidak dapat memanen kelapa sawit miliknya maka ia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada seseorang yang ahli dan memberikan upah sebesar Rp. 200/kg buah kelapa sawit yang dipanen.

Selain itu, untuk mendapatkan hasil buah yang maksimal diperlukan beberapa perawatan diantaranya yakni pemupukan dan pemangkasan atau biasa dikenal dengan istilah pruning. Perawatan pohon kelapa sawit biasanya dilakukan oleh para petani itu sendiri. Namun, ketika para pemilik lahan kelapa sawit tidak dapat merawatnya maka ia memberikan pekerjaan kepada buruh lepas dengan upah tertentu. Adapun

banyaknya biaya dikeluarkan sebagai ongkos pemangkasan oleh pemilik kebun biasanya berkisar Rp.3000,- sampai Rp. 4000,- perpohonnya.

Penanaman pohon kelapa sawit pada mulanya berdasarkan kelompok tani yang dibentuk 8 anggota dalam tiap-tiap kelompok, semua hal-hal mengenai penyediaan pupuk, pendistribusian buah kelapa sawit sampai pada pabrik PT. Surya Lestari I, dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit diurus oleh masing-masing kelompok tani. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa masalah yang terjadi antara masing-masing anggota kelompok yang menyebabkan beberapa kelompok tani ini mulai terpecah dan bubar. Lalu, mereka yang tidak memiliki kelompok tani menjual buah kelapa sawit mereka kepada pedagang (tengkulak) yang menerima buah kelapa sawit dan membayarnya dibawah harga pabrik dengan alasan pemotongan biaya administrasi dan ongkos mobil muatan buah yang mengantarkan buah ke pabrik. Selain itu, pedagang (tengkulak) mampu membayarkan uang buah sawit langsung kepada para petani setelah penimbangan buah selesai dilakukan dan pedagang (tengkulak) menyediakan pupuk khusus untuk sawit yang dapat diangsur pembayarannya oleh para petani.

Adapun penanaman pohon kelapa sawit sampai dapat menghasilkan buah yang sesuai untuk dipanen dibutuhkan waktu selama 4 tahun lamanya. Kemudian, setiap pohon kelapa sawit akan terus menghasilkan buah hingga 30 tahun lamanya. Jika penanaman pohon kelapa sawit pada tahun 2006 maka dapat dipanen pada tahun 2010. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa penggadaian kebun kelapa sawit hanya

bisa dilakukan pada tahun 2010 atau setelahnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Suherno (Rahin) sebagai berikut:

Pas kebutuhan mendesak yang tidak bisa diapa, ditanggulangi. Akhirnya menggadaikan misalnya barang yang berharga seperti kebun yang kira-kira bisa ditawarkan sama orang, yang kira-kira menghasilkan. Orang mau menerima gadai karena ada hasilnya yang mau dipetik yang mau diambil. Dan orang pasti, pasti mau kalau ada hasilnya kalau cuman tanah kosong tidak mau.<sup>73</sup>

Suatu kebun yang digunakan sebagai barang jaminan atas sejumlah utang dapat diterima oleh para petani pedagang yang berperan sebagai penerima gadai ketika barang yang dijaminkan itu berbentuk kebun kelapa sawit yang telah ada hasilnya, yakni kebun kelapa sawit yang sudah siap untuk dipanen.

## **2. Praktik Gadai di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah**

Kehidupan bermasyarakat adalah interaksi manusia dengan segala yang berada disekitarnya, manusia harus menyesuaikan dengan lingkungannya, berinteraksi dengan keluarganya, tetangganya dan juga masyarakat secara umum. Mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan memberi terhadap segala macam kebutuhan yang mereka hadapi. Masyarakat Karossa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang mengalami beberapa kesulitan dan salah satu langkah yang dilakukan ketika mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan yang yakni dengan melakukan gadai.

---

<sup>73</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00 WITA.



Gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.<sup>74</sup> Secara istilah, Gadai/ *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>75</sup> Hal yang berkaitan dengan gadai diungkapkan oleh seorang rahin yakni Bapak Suherno dalam wawancara bersama peneliti yakni:

Gadai adalah meminjam uang kemudian memberikan jaminannya, jaminannya berupa kebun atau sertifikat dan sebagainya.<sup>76</sup>

Seiring dengan itu, hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu *murtahin* yakni Bapak Arifuddin:

Istilah penggadaian ini antara petani. Eh, antara pedagang dan petani itu istilahnya kita ada istilahnya kalau petani ada sertifikat hasilnya itu petani harus dikalikan perbulannya berapa bisa digadaikan.<sup>77</sup>

Adapun menurut Bapak Rustino selaku masyarakat umum memandang gadai sebagai berikut:

Penggadaian itu terjadi antara kedua belah pihak, istilahnya sama pihak yang mau meminjam dan pihak yang meminjamkan.<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, h. 1

<sup>75</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 147.

<sup>76</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00 WITA.

<sup>77</sup>Kutipan wawancara dengan Bapak Arifuddin di rumahnya Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 15.00 WITA.

<sup>78</sup>Kutipan wawancara dengan Bapak Rustino di rumahnya Pada hari Senin, 24 September 2018, Pukul 14.00 WITA.

Adapun Gadai Menurut al-Qurtubi adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberikan utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak pengutang melunasi utang tersebut. Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjual sewaktu-waktu bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya.<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang yang berharga seperti sertifikat atau kebun atas sejumlah uang yang dipinjam, ketika diselaraskan dengan materi yang telah ada dan beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan gadai sebagai barang tahanan atau menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang sampai pihak pengutang melunasi, dan jika tidak dapat dilunasi maka barang dapat dijual. Maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang yang berharga seperti sertifikat atau kebun yang menghasilkan (telah siap panen) dengan jangka waktu tertentu, barang jaminan tersebut dapat kembali kepada pemiliknya ketika peminjam (penggadai) telah membayar sejumlah uang yang dipinjamnya dan apabila tidak dapat melunasi uang pinjaman dalam jangka waktu tertentu maka barang yang dijaminkan dapat dijual untuk menutupi pembayaran pinjaman yang belum diselesaikan oleh peminjam (penggadai).

---

<sup>79</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 192.

Adapun praktik penggadaian pada masyarakat Karossa dapat diketahui secara menyeluruh dengan memahami beberapa tahapan atau fase yang tercakup dalam penggadaian itu tersendiri. Tahapan ini dimulai dari hal yang menjadi alasan terjadinya penggadaian sampai pada terjadinya akad gadai.

Alasan kuat yang menjadi dasar terjadinya praktik penggadaian adalah keadaan terdesaknya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sulitnya mencari pinjaman berupa uang kepada orang lain dalam jumlah besar tanpa adanya sebuah barang yang dapat dijaminkan, Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang *rahin* yakni Bapak Suherno:

Pas kebutuhan mendesak yang tidak bisa diapa, ditanggulangi. Akhirnya menggadaikan misalnya barang yang berharga seperti kebun yang kira-kira bisa ditawarkan sama orang.<sup>80</sup>

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan gadai yakni diantaranya sebagai berikut:

a. Segi Pertemuan

Awal pertemuan seorang *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah sebuah hasil prakarsa dari *rahin*. *Rahin* mencari dan mendatangi orang yang dianggap dapat membantunya atau orang yang memang diketahui biasa menerima barang jaminan untuk memberikan pinjaman. hal ini sesuai dengan masyarakat karossa yakni saudara Wahyu Agung Setiawan:

---

<sup>80</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00 WITA.

yo seng duwe kebon teko moro nang gole' seng duwe duit, seng duwe kebon teko langsung.<sup>81</sup>

Ya, yang memiliki kebun datang menemui yang memiliki uang, yang memiliki kebun datang secara langsung.

Wawancara tersebut menjelaskan tentang yang terjadi di karossa, bahwa rahin yang ingin meminjam dengan menggadaikan barang datang dengan sendirinya secara langsung menemui orang yang dianggapnya memiliki sejumlah uang dan dapat membantunya.

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh *murtahin* yakni bapak Arifuddin dalam wawancara dengan peneliti:

Caranya ya dengan cara menawarkan, maksudnya apakah caranya yaitu meminjam dengan syarat ada jaminannya yaitu berupa kebun.<sup>82</sup>

Adapun dalam ekonomi Islam syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad (*rahin dan murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumbuh Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.<sup>83</sup> Adapun dalam pasal 330 KHES menyebutkan bahwa cakap hukum yang dimaksudkan berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui seseorang yang melakukan akad gadai adalah orang yang berakal karena ia mampu berfikir

---

<sup>81</sup>Kutipan Wawancara dengan saudara Wahyu Agung Setiawan di rumahnya Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 13.00 WITA.

<sup>82</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya, Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00

<sup>83</sup>Abdul RahmanGazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

<sup>84</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 195.

untuk mencari seseorang yang dianggap memiliki uang dan ia tidak berada dalam situasi dipaksakan oleh *murtahin* karena *rahin* dengan sendirinya dalam keadaan sadar datang menemui dan menawarkan sebuah barang yang berupa kebun kelapa sawit untuk dijadikan sebagai barang jaminan atas uang yang dipinjam. Sehingga dapat diketahui rukun dan syarat berkaitan dengan orang yang melakukan gadai terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

b. Segi Menetapkan Nominal Uang yang dapat Dipinjam

Ketika seseorang yang hendak meminjam dengan menggadaikan barang yang bernilai. Maka tidak serta merta pihak penerima gadai akan langsung menyetujui dan memberikan uang yang akan dipinjamkannya. Namun hal yang dilakukan dengan pentaksiran besarnya uang yang dapat dipinjamkan oleh penerima gadai (petani pedagang) yang bertujuan agar besarnya uang yang dipinjamkan dan batasan waktu dalam pembayaran utang tersebut, hal itu bertujuan agar jumlah uang yang dipinjamkan tidak melebihi nilai barang jaminan.

Adapun persyaratan mengenai *marhun bih* (utang) dalam ekonomi Islam adalah, *pertama*: utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. *kedua*: utang itu boleh dilunasi dengan jaminan,<sup>85</sup> dengan kata lain, jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan.<sup>86</sup> *ketiga*: utang itu jelas dan tertentu.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Abdul RahmanGazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 268.

<sup>86</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 196.

<sup>87</sup>Abdul RahmanGazali. DKK, *Fiqh Muamalah*, h. 268.

Adapun dalam praktiknya cara menaksir yang dilakukan oleh murtahin dijelaskan oleh Bapak Arifuddin sebagai berikut:

Hasilnya itu petani harus dikalikan dengan hasil perbulannya, baru bisa kita berapa bisa digadaikan. Kalau tadinya hasil perbulannya dari tanah sekitar Rp.2000.000 berarti kemampuan bisa gadai, ehh... ini maksimal kita bisa ambil gadai ini dengan hasil tertentu, Rp. 2000.000 perbulannya kita bisa ambil gadai Rp. 10.000.000.<sup>88</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat menentukan besarnya nominal uang yang dapat dipinjamkan maka besarnya penghasilan dari kebun kelapa sawit milik penggadaikan dalam perbulannya dikalikan dengan waktu yang digunakan untuk melunasi dan nominal uang yang dipinjamnya dibawah dari nominal pengkalian penghasilan kebun tersebut. Seperti contoh yang disebutkan ketika rata-rata pendapatan dalam perbulan Rp.2000.000 dan batasan waktu peminjaman selama 6 bulan maka Rp.2000.000 tersebut dikali dengan waktu 6 bulan diketahui hasilnya Rp. 12.000.000, maka jumlah uang yang dapat dipinjamkan sebanyak Rp.10.000.000. sehingga barang yang digadaikan bernilai diatas uang yang akan dipinjamkan.

Uang yang dipinjam oleh *rahin* merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Karena selama akad gadai masih berlaku maka barang yang dijadikan sebagai jaminan memang masih sah menjadi hak milik *rahin* hanya saja *rahin* tidak dapat mengelola atau mengambil manfaat barang tersebut karena barang itu tertahan di *murtahin*, dan barang akan kembali ketika *rahin* dapat membayarkan sejumlah uang yang dipinjam.

---

<sup>88</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Arifuddin di rumahnya Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 15.00 WITA.



### c. Segi Pengembalian Pinjaman

Ada tiga cara pengembalian uang pinjaman oleh *rahin* yang diberikan oleh *murtahin* yakni diangsur setiap bulannya atau dibayar sekaligus ketika *rahin* telah memiliki uang dan dibayarkan pada saat jatuh tempo semua tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun ketika terjadi suatu masalah seperti jatuh temponya pembayaran tetapi *rahin* tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan yakni dengan cara *murtahin* memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada *rahin*.

Adapun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dari itu *murtahin* membatasi orang-orang yang boleh menggadai padanya. Cara membatasinya yakni dengan memilih orang yang hanya dalam satu ruang lingkup saja yakni dalam satu desa saja dan tidak menerima gadai dari masyarakat desa lainnya. Hal ini dijelaskan oleh bapak Arifuuddin (*murtahin*) sebagai berikut:

Sepanjang bukan satu daerah kita kasih itu, banyak efek sampingnya kalau bukan. Kalau kita disini ada istilahnya kekeluargaan, kalau di kampung ta sendiri kekeluargaan, kalau dari luar itu harus ada pegangan hukum.<sup>89</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa ketika menerima gadai dari luar desa tempat *murtahin* bermukim maka ditakutkannya banyak hal-hal yang buruk terjadi karena *murtahin* tidak mengenali secara penuh *rahin*, bisa saja menerima gadai dari masyarakat luar desa hanya saja harus ada pegangan hukum, yakni perjanjian tertulis

---

<sup>89</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Arifuuddin dirumahnya, Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 15.00.

antara kedua belah pihak yang apabila terjadi sengketa atau masalah dapat dibawa kepada pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan sengketa.

d. Segi Penetapan yang Berhak Memanfaatkan Barang Gadai

Perbincangan peneliti dengan beberapa narasumber yang berbeda, mereka mengutarakan hal mengenai pemanfaatan barang gadai itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad gadai, bisa saja *rahin* (penggadai) atau pemilik kebun yang mengelola dan mengambil manfaat atas barang gadai tersebut dan bisa pula *murtahin* yang mengelola dan mengambil manfaat atas kebun yang dijadikan sebagai barang jaminan. Hal itu disebutkan oleh bapak Rustino selaku masyarakat umum sebagai berikut:

Kalau itu tergantung dari penjanjian, tetapi yang sudah saya ketahui yang sudah berlaku selama ini mungkin itu kebun yang digadaikan, ee... pasti dikelola sama yang punya, ya penggadai hanya menerima angsuran saja.<sup>90</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai tergantung dari kesepakatan, dan menurut bapak Rustino ini sangatlah jelas bahwa pemanfaatan oleh *rahin* itu adalah suatu kemungkinan terjadi apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun menurut Imam Syafi'i *rahin* (penggadai) boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin *murtahin* (penerima gadai). Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad saw:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup>Kutipan wawancara dengan Bapak Rustino di rumahnya Pada hari Senin, 24 September 2018, Pukul 14.00 WITA.

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-Syafi'yah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah)

Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat imam syafi'I yang berpedoman pada hadis nabi dapat diketahui bahwa apabila memang terjadi pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* maka hal itu diperbolehkan dengan izin ataupun tanpa izin dari *murtahin*.

Adapun menurut Bapak Arifuddin selaku *murtahin* ia mengatakan:

Adanya persetujuan bagi hasil antara petani pedagang karena tidak mutlak juga petani pedagang ini langsung terjun ke lapangan. Ya bagi lima, bagi empat kita yang tiga begitu.<sup>92</sup>

Maksud dari pernyataan ini adalah bisa saja *rahin* yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut hanya saja hasil dari kelapa sawit dibagi antara kedua belah pihak, adapun nisbahnya sesuai dengan kesepakatan, bisa saja bagi empat, *murtahin* mendapatkan 3 bagian dan *rahin* mendapatkan satu bagian.

Adapun hal berbeda yang dikatakan oleh Ibu Darmawati:

Tegantung dari kesepakatan bisa saja kita sendiri yang kerja toh, tapi hasil kerjanya kita digaji sama yang menggadai kebunnya.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, h.291

<sup>92</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Arifuddin di rumahnya, Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 15.00 WITA.

<sup>93</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Darmawati di rumahnya, Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 20.00 WITA.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bisa saja *murtahin* yang mengelola barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit dan dari hasil kerjanya mengelola kebun kelapa sawit tersebut ia diberi upah oleh *rahin*.

Semua hal yang dikatakan oleh *murtahin* dan masyarakat umum yang telah diwawancarai adalah sebuah konsep gadai yang ditawarkan dan hal itu bisa saja terjadi bisa juga tidak. Adapun yang benar-benar terjadi dalam praktik yang dialami oleh Bapak Suherno selaku *rahin* adalah pemanfaatan barang gadai baik itu pengelolaannya ataupun hasil panen dari kebun kelapa sawit yang ia gadaikan kepada salah satu *murtahin* di Karossa adalah sepenuhnya menjadi hak *murtahin*. Hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama peneliti:

Yang mengambil hasilnya yang punya uang, harus diambil dikelola sama penerima gadai, karena mereka mau mengambil hasilnya supaya uangnya berkembang juga ibaratnya. Ya mencari keuntungan sambil istilahnya ya membantu meringankan beban yang apa, yang merasa perlu uang atau perlu pinjaman.<sup>94</sup>

#### e. Segi ikrar Perjanjian

Setelah didapatkan nominal uang yang dapat dipinjam, diketahui sistem pengembalian uang dan yang berhak dalam memanfaatkan barang gadai dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak maka terjadilah ikrar perjanjian dari kedua belah pihak, Hal ini biasa di sebut dengan istilah ijab dan qabul. Pada umumnya pengikraran akad yang terjadi pada masyarakat karossa yakni dengan secara lisan

---

<sup>94</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno dirumahnya, Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00

meminjam uang dan menyerahkan barang yang dijaminkan tanpa adanya surat bukti serah terima. Hal ini dikatakan oleh Bapak Suherno:

Cuman persetujuan secara lisan saja karena saling percaya gitu.<sup>95</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan ijab kabul antara *rahin* dan *murtahin* terucap secara lisan tanpa harus dituliskan dalam kertas alasannya karena kedua belah pihak telah sama-sama percaya. Adapun mengenai penulisan atas transaksi utang tertuang dalam surah al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عِندَ اللَّهِ قَلْبُورٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan jika terjadinya utang piutang ditengah perjalanan dan tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan dengan memegangkan tanggungan (jaminan). Boleh tanpa tanggungan, tetapi Allah mengingatkan supaya yang berutang membayar tepat pada waktunya dan hendaknya ia takut kepada ancaman Tuhan atas

<sup>95</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno di rumahnya, Pada hari Jum'at, 21 september 2018, Pukul 17.00.

orang yang berlaku khianat. Ibnu Abbas berkata: Mungkin ada penulis tetapi tidak ada alat tulisnya, maka hukumnya sama saja.<sup>96</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat tadi dapat diketahui bahwa ketika barang jaminan diberikan ketika tidak adanya penulis atau tidak adanya alas tulis yang dapat digunakan untuk mencatat utang piutang yang dilakukan, dan ketika saling mempercayai maka tidak perlu adanya barang gadai. Jika diseleraskan dengan hasil wawancara dengan informan maka ikrar gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* dengan cara pengucapan secara lisan tanpa adanya bukti tulisan merupakan hal yang dapat dibenarkan karena gadai adalah jaminan ketika melakukan utang piutang dan tidak menemukan penulis.

Namun untuk menghindari hal-hal buruk yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari, maka ijab qabul gadai yang diucapkan secara lisan itu dituliskan dalam nota penerimaan sebagai surat bukti serah terima uang pinjaman. Adapun contoh surat bukti serah terima gadai dapat dilihat pada gambar:




---

<sup>96</sup>Salim Bahreisy. Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (Jilid I, Cet. IV; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 564



KWITANSI	
Sudah terima dari	: D A M A N
Banyaknya Uang	: Dua Puluh Juta Rupiah
Untuk pembayaran	: Penggadaian Kebun Kelapa Sawit Seluas 0,5 Ha Dalam Jangka Waktu 24 Bulan ( 2 Tahun ) Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2017 Sampai dengan 2 Januari 2019
Rp. 20.000.000,-	
Mora IV, 2 Januari 2017	
Yang Menerima Gadai :	Yang Menggadaikan :
 DAMAN	 TARMINI
Saksi - Saksi :	
 1. SUHERNO	 2. DIAN RESDIANA

Gambar: 4.2  
Surat Bukti serah terima gadai

Pembuatan surat bukti yang dilakukan adalah sebuah tambahan dalam transaksi gadai yang bertujuan agar dimasa mendatang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak yang menggadai. Berdasarkan hukum ekonomi Islam hal seperti itu boleh dilakukan, kaidah ushul fiqih yang menjelaskan hal ini yakni:

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

“Hukum dasar syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal”<sup>97</sup>

Maksud dari kaidah ushul fiqih tersebut adalah umat islam dibebaskan untuk mengembangkan model mu’amalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan

<sup>97</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, h. 13.

sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan maka penulisan transaksi gadai benar-benar boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip mu'amalah.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah**

Praktik pemanfaatan suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan (barang gadai) yang berupa kebun kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah adalah sepenuhnya menjadi hak dari murtahin baik hak pengelolaan atas barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit ataupun seluruh jumlah penghasilan dari kebun kelapa sawit itu. Hal itu sesuai dengan yang dialami oleh Bapak Suherno yang merupakan salah satu *rahin*.

Yang mengambil hasilnya yang punya uang, harus diambil dikelola sama penerima gadai, karena mereka mau mengambil hasilnya supaya uangnya berkembang juga ibaratnya. Ya mencari keuntungan sambil istilahnya ya membantu meringankan beban yang apa, yang merasa perlu uang atau perlu pinjaman.<sup>98</sup>

Hal sama diungkapkan oleh Bapak Arifuddin selaku *murtahin* yang menerima barang gadai milik Bapak Suherno sebagai berikut:

Itu sawitkan tidak semuanya harga itu turun naik, pupuknya juga termasuk pengelolaan, makanya itu harus standar diatas memang gadai, istilahnya

---

<sup>98</sup>Kutipan Wawancara dengan Bapak Suherno dirumahnya, Pada hari Jum'at, 21 September 2018, Pukul 17.00

gadai, supaya penggadaian itu kita gadai tanahnya orang supaya bisa kita tutupi di Bank, Karena kita disini kita pedagang butuh di BRI itu.<sup>99</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai sepenuhnya menjadi hak dari *murtahin* karena ada dua alasan yakni *pertama: murtahin* berniat menolong *rahin* yang dalam keadaan kesusahan, *kedua: murtahin* juga ingin memperoleh keuntungan dan tak ingin dirugikan dengan pengendapan uang miliknya yang dipinjamkan secara cuma-cuma karena uang yang digunakan untuk meminjamkan kepada *rahin* juga termasuk kedalam pinjaman *murtahin* ke suatu lembaga keuangan yang menjadi kewajibannya untuk mengangsurnya.

Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad saw. hanya saja hal itu dikecualikan dengan jenis barang yang digadaikan jika barang yang digadaikan itu merupakan barang yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan maka *murtahin* diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Adapun beberapa hadis yang menerangkan pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* adalah sebagai berikut:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمَهُ وَ عَلَيْهِ غَرْمُهُ.

Artinya:

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (Hadis Riwayat al-Syafi'iah, al-Daruquthni dan Ibnu Majah).

---

<sup>99</sup>Kutipan wawancara dengan Bapak Arifuddin di rumahnya, Pada hari Minggu, 23 September 2018, Pukul 15.00

Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa *rahin* (penggadaai) boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin* (penerima gadai), penerima gadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila pihak penerima gadai mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan.

Adapun Hadis yang menerangkan pembolehan pemanfaatan barang yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan adalah sebagai berikut:

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya:

Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah.

Ulama Hanbaliyah menjelaskan apabila barang yang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan seperti binatang ternak, maka pihak penerima gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti pemeliharaannya meskipun tidak diizinkan penggadaai.

Adapun kebun kelapa sawit merupakan suatu barang yang memerlukan pengelolaan dan perawatan. Pohon kelapa sawit tidak akan berbuah semestinya tanpa ada perawatan dari petani, perawatannya diantaranya adalah pemupukan, pemangkasan pelepah pohon dan juga pembersihan gulma. Maka dapat diketahui bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dibelohkan karena termasuk barang yang membutuhkan pengelolaan dan perawatan, namun dalam pemanfaatan barang

gadai tersebut *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat lebih dari pengganti biaya perawatan barang gadai.

Pada dasarnya hukum pemberian pinjaman adalah sunnah karena mengandung suatu nilai kebajikan yakni tolong menolong orang yang sedang mengalami kesulitan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Sesuai dengan penggalan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5): 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>100</sup>

Namun, ketika pemberian pinjaman tersebut mendatangkan sejumlah keuntungan maka tidak diperbolehkan. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang pengambilan keuntungan dari sebuah pinjaman, yakni:

Artinya: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat kepada kreditor itu termasuk riba.

<sup>100</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002)

Berdasarkan keterangan hadis tersebut, ketika memberikan pinjaman kepada orang lain disunnahkan untuk pembayarannya atau membayar dengan lebih baik. Akan tetapi, apabila orang yang memberi pinjaman itu sengaja mengambil manfaat dari utang itu atau mensyaratkan pembayaran lebih maka kelebihan itu menjadi riba.

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim dan dilarang oleh Allah. Landasan tentang pelarangan riba tertuang dalam al-Qur'an surah ar-Rum (30): 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>101</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang penolakan anggapan pinjaman dengan adanya riba pada zhohirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun ayat lain yang menerangkan tentang pelarangan riba yakni dalam surah ali-Imran (3): 130

---

<sup>101</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2002)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Adapun untuk lebih jelasnya mengetahui keuntungan atau nilai tambah yang didapatkan oleh murtahin selama jangka waktu gadai yang terjadi di kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah akan dituangkan dalam sebuah narasi alur peminjaman dan dihitung dengan detail oleh penulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Hasil Neto} = \text{Hasil Bruto} - \text{Biaya pengelolaan}$$

Kasus Pertama:

Pada tahun 2016 Bapak Suherno meminjam uang dengan salah satu tetangganya yang berprofesi sebagai pedagang yang menurutnya saat itu dapat menolongnya dengan cara menawarkan sebidang lahan miliknya perorang (tanpa melibatkan kelompok tani) dengan luas mencapai 500m<sup>2</sup> yang berisi pohon kelapa sawit 69 pohon telah menghasilkan ± 700 kg dalam sekali panennya sebagai barang jaminan atas uang yang ingin dipinjam.

Uang yang dapat bapak Suherno pinjam pada saat itu sebesar Rp. 10.000.000 dengan hak pengelolaan sepenuhnya menjadi hak *murtahin* dan hasil dari kebun kelapa sawit menjadi hak *murtahin* juga, dalam waktu satu bulan beliau telah mengembalikan uang tersebut kepada *murtahin* dengan jumlah yang sama saat peminjaman. Maka peneliti dapat menghitungnya dengan jangka waktu sebulan yakni 3 kali masa panen. Sekali panen kebun dapat menghasilkan  $\pm 700$  kg, dengan harga sawit pada tahun 2016 Rp. 800/kg nya yang diberikan oleh tengkulak, dan biaya panen sebanyak Rp. 200/kg. Maka cara yang digunakan untuk menghitung berapa banyak yang didapatkan oleh murtahin selama 1 kali masa panen dan selama masa satu bulan peminjaman adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil Bruto} &= \text{Jumlah buah kelapa sawit} \times \text{harga/kg} \\
 &= 700 \text{ Kg} \times \text{Rp. 800} \\
 &= \text{Rp. 560.000}
 \end{aligned}$$

Biaya Pengelolaannya

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Panen} &= 700 \text{ kg} \times \text{Rp. 200} \\
 &= 140.000
 \end{aligned}$$

Maka hasil netto yang di dapatkan oleh murtahin selama satu kali masa pemanenan adalah

$$\begin{aligned}
 \text{Hasil Netto} &= \text{Hasil Bruto} - \text{Biaya pengelolaan} \\
 &= \text{Rp. 560.000} - \text{Rp. 140.000} \\
 &= \text{Rp. 420.000}
 \end{aligned}$$

Selisih yang bernilai Rp. 420.000 inilah yang menjadi keuntungan untuk pihak *murtahin*.

Dalam waktu satu bulan masa penggadaian, kebun kelapa sawit dipanen sebanyak 3 kali maka diketahui hasil yang didapatkan oleh murtahin adalah

$$\begin{aligned}\text{Keuntungan/bulan} &= \text{Rp. 420.000} \times 3 \text{ kali Panen} \\ &= \text{Rp. 1.260.000}\end{aligned}$$

Maka pada masa pengembalian besarnya uang yang diterima oleh pihak *murtahin* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah pengembalian yang} &= \text{Rp. 10.000.000} + \text{Rp. 1.260.000} \\ \text{di terima murtahin} &= \text{Rp. 11.260.000}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Presentasi keuntungan} &= \frac{\text{hasil netto satu bulan}}{\text{jumlah utang}} \times 100\% \\ &= \frac{1.260.000}{10.000.000} \times 100\% \\ &= 12,6 \%\end{aligned}$$

Prosentase keuntungan yang diperoleh oleh murtahin dalam satu bulan masa penggadaian adalah sebesar 12,6 % terhadap jumlah utang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*.

Kasus kedua, yakni terjadi pada Saudara Muhammad Mujaki yang membutuhkan uang sejumlah Rp.20.000.000 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, melalui seorang perantara bernama Dian Resdiana yang merupakan masyarakat Karossa juga, ia meminjam dengan menjaminkan kebun kelapa sawit milik orang tuanya seluas 500 m<sup>2</sup>/0,5 Ha yang menghasilkan buah kelapa sawit

mencapai  $\pm 600$  kg dalam satu kali panennya. Transaksi gadai tersebut terjadi atas persetujuan orang tuanya atas nama Tarmini.

Akad gadai yang terjadi dalam waktu 2 tahun (24 bulan) perjanjian namun saudara Muhammad Mujaki mampu membayarkan dalam jangka waktu 1 tahun maka dalam jangka waktu itu terdapat 2 kali pemangkasan dan 3 kali pemupukan. Adapun rinciannya sebagai berikut: Hasil kelapa sawit dalam satu kali panen ditaksir mencapai  $\pm 600$  kg dan kita hitung dengan paling rendahnya harga yang diberikan perusahaan kepada petani 1000/kg, harga pupuk Rp. 140.000/karung, biaya pemangkasan mencapai 4000/pohon dan biaya pemanenan Rp.200/kg dan ongkos mobil 150.000/1000 kg atau Rp. 150/kg. untuk mencari keuntungan dari pemanfaatan barang gadai oleh murtahin selama masa penggadaian barang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil bruto} &= \text{Jumlah buah kelapa sawit} \times \text{harga/kg} \\ &= 600 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1000 \\ &= \text{Rp. } 600.000 \end{aligned}$$

Biaya Pengelolaannya

- Biaya panen  $= 600 \text{ kg} \times \text{Rp. } 200$   
 $= \text{Rp. } 120.000$

- Ongkos Mobil  $= 600 \text{ kg} \times \text{Rp. } 150$   
 $= \text{Rp. } 90.000$

$$\text{Total Biaya pengelolaan} = \text{Rp. } 120.000 + \text{Rp. } 90.000$$

$$= \text{Rp. 210.000}$$

Maka hasil netto yang di dapatkan oleh murtahin selama satu kali masa pemanenan yakni:

$$\begin{aligned} \text{Hasil Netto/panen} &= \text{Hasil Brurto} - \text{Total Biaya pengelolaan} \\ &= \text{Rp. 600.000} - \text{Rp. 210.000} \\ &= \text{Rp. 390.000} \end{aligned}$$

Selisih yang bernilai Rp. 390.000 inilah yang menjadi keuntungan untuk pihak *murtahin* dalam kurun waktu satu kali panen.

Dalam waktu satu bulan penggadaian, kebun kelapa sawit di panen sebanyak 3 kali maka diketahui hasil yang didapatkan oleh murtahin adalah

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan/bulan} &= \text{Rp. 390.000} \times 3 \text{ kali Panen} \\ &= \text{Rp. 1.170.000} \end{aligned}$$

Adapun dalam masa 6 bulan terdapat beberapa biaya perawatan yang wajib dikeluarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan 6 bulan} &= \text{Rp. 1.170.000} \times 6 \text{ bulan} \\ \text{Diluar biaya perawatan} &= \text{Rp. 7.020.000} \end{aligned}$$

Biaya perawatan

- Pupuk = 4 karung  $\times$  140.000  
= Rp. 560.000
- Pemangkasan = 69 pohon  $\times$  Rp.4000  
= Rp. 276.000

$$\text{Total Biaya perawatan} = \text{Rp. 560.000} + \text{Rp. 276.000}$$

$$= \text{Rp. 836.000}$$

$$\text{Keuntungan Netto/6 bulan} = \text{Rp. 7.020.000} - \text{Rp. 836.000}$$

$$= \text{Rp. 6.184.000}$$

Jika penggadaian terjadi dalam masa dua tahun dan perawatan mencapai 4 kali maka hasil keuntungan yang didapatkan adalah

$$\text{Keuntungan/ 1 tahun} = \text{Rp. 6.184.000} \times 2$$

$$= \text{Rp. 12.368.000}$$

Maka pada masa pengembalian besarnya uang yang diterima oleh pihak *murtahin* adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah pengembalian yang diterima } murtahin = \text{Rp. 20.000.000} + \text{Rp. 12.368.000}$$

$$= \text{Rp. 22.368.000}$$

$$\text{Presentasi keuntungan} = \frac{\text{hasil netto dalam masa gadai}}{\text{jumlah utang}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 12.368.000}}{\text{Rp. 20.000.000}} \times 100\%$$

$$= 61,84\%$$

Prosentase keuntungan yang diperoleh oleh *murtahin* dalam satu tahun masa penggadaian mencapai 61,84% terhadap jumlah utang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*.

Berdasarkan materi tentang pemanfaatan barang gadai yang dikemukakan oleh beberapa ulama menerangkan barang gadai yang memerlukan perawatan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* tetapi tidak melewati batas dari pengganti biaya



perawatannya saja. Adapun dalam praktiknya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* melebihi dari pengganti biaya perawatan dan mendapatkan keuntungan sebesar 12,6% - 61,84 sedangkan dasar dari pemberian pinjaman adalah untuk menolong sesama dan tidak boleh dengan sengaja untuk mencari keuntungan dan itu termasuk kedalam riba dan merugikan salah satu pihak. adanya keuntungan yang didapatkan oleh *murtahin* melalui pemanfaatan barang gadai dari jumlah utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* atau biasa disebut dengan istilah nilai tambah, maka dengan jelas nilai tambah ini merupakan riba, dan riba adalah hal yang dilarang baik dalam al-Qur'an maupun hadis dan para ulama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketetapan hukum ekonomi Islam terhadap tindakan *murtahin* dalam memanfaatkan barang gadai di Kecamatan Karossa kabupaten Mamuju tengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tindakan Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak *murtahin* adalah boleh dalam ekonomi Islam karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Namun pengambilan manfaat tidak boleh melebihi biaya perawatan dan pemeliharaannya. Adapun tindakan Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* yang melebihi dari biaya perawatan yakni adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh *murtahin* adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba dan mendzalimi pihak *rahin*.

#### ***B. Rekomendasi***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan dituliskan oleh peneliti melalui tulisan ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, untuk peneliti berikutnya yang berniat untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama, sesungguhnya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih ada bagian-bagian dari pembahasan dalam skripsi ini yang dapat diteliti lebih

lanjut dan dapat menganalisis hal-hal yang menjadi hasil penelitian ini lebih terperinci. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan mendatangkan inspirasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

*Kedua*, untuk kedua pihak yang melakukan akad gadai terkhusus kepada pihak *murtahin* agar lebih berhati-hati dalam melakukan penerimaan (pemanfaatan) barang gadai, niatan utama meminjamkan uang untuk menolong pihak yang membutuhkan bernilai kebaikan. Namun, ketika memanfaatkan barang gadai lebih dari sekedar mengganti biaya pengelolaan atau perawatannya maka hal itu tidak dibenarkan dan termasuk riba, riba adalah sesuatu yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Adapun untuk *rahin*, harus dapat mengerti dan selektif memilih untuk menggadaikan barang kepada orang yang memang benar-benar mengerti hal-hal yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan barang gadai, karena jika tidak selektif secara tidak langsung *rahin* akan dirugikan dengan tindakannya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin Ibn., *Hasyisah Radd Al-Mukhtar*. Digital Library, al-Syamilah al-Isdar al-Sani 2005.
- Afandi Yazid, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Edisi I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Antonio Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2001.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka. 2014.
- Bahreisy Salim, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. Cet IV. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2004
- Gazali Abdur Rahman. DKK, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010
- Ghafur W Muhammad. *Memahami bunga dan riba ala muslim Indonesia*. Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Press. 2008.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari’ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Hadi Muhammad Solikhul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Irfan. *Hukum Transaksi dalam lingkup Mazhab*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss. 2014.
- Jhon W Creswell. *Translate Design Research Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed*. 2014.
- Karim Adiwarman A dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*.
- Madjid Baihaqi Abdul. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah; Pengelolaan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. Jakarta: Pinbuk. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Mardani *Hukum Ekonomi Syari’ah*

- Martono Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi II. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Moleong Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1989.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Perss. 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sahrani Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalat*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Siregar Syofian. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Edisi. I. Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suryabrata Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Supoto Ariesto Hadi, Andrianus Arief. *Terampil Mengelola Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Syafe'I Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Zuhri M. *Riba dalam Al- Qur'an dan Masalah Perbankan*. Cet. II; Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada. 1996.
- Zuhaili Wahba. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a green geometric emblem. It features a central yellow star with the year '1965' inside. The emblem is composed of several interlocking shapes that form a larger, stylized arch or dome-like structure.

# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## PEDOMAN WAWANCARA

### I. Untuk Penggadai (Rahin)

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan gadai?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai?
3. Siapa yang melakukan akad gadai?
4. Apa barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam menggadaikan?
5. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan kebun kelapa sawit yang digadaikan?
6. Sejak kapan bapak/ibu melakukan gadai?
7. Apakah yang menjadikan dorongan bapak/ibu untuk menggadaikan kebun kelapa sawit?
8. Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit itu?
9. Bagaimana cara bapak/ibu mengembalikan pinjaman?
10. Apakah penerima gadai menentukan batasan waktu dalam menggadaikan kebun kelapa sawit?
11. Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai?
12. Dalam pelaksanaan akad gadai apakah bapak ibu mendatangkan masyarakat sebagai saksinya dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti bahwa bapak/ibu melakukan akad gadai?

13. Selama bapak/ibu melakukan akad gadai, Apakah pernah terjadi perselisihan bapak/ibu dengan penerima gadai?

## II. Untuk Penerima Gadai (Murtahin)

1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan akad gadai?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai?
3. Siapa yang melakukan akad gadai?
4. Apa barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad gadai?
5. Bagaimana cara penggadai menawarkan kebun kelapa sawit yang digadaikan?
6. Sejak kapan penerima gadai menerima barang gadai?
7. Siapa yang berhak mengelola barang gadai yang berupa kebun kelapa sawit itu?
8. Bagaimana jika peminjam uang hanya menggadaikan berupa sertifikat tanahnya saja, apakah bapak ibu akan tetap memberikan pinjaman?
9. Apakah bapak/ibu menentukan batasan waktu dalam menggadaikan kebun kelapa sawit?
10. Pada saat pengembalian pinjaman, apakah jumlah pinjaman dikurangi dengan jumlah pendapatan dari pemanfaatan barang gadai?
11. Ketika terjadi pelaksanaan akad gadai, apakah bapak/ibu mendatangkan masyarakat sebagai saksinya dan apakah ada surat tertulis sebagai tanda bukti bahwa bapak/ibu melakukan akad gadai?
12. Selama bapak/ibu melakukan akad gadai, Apakah pernah terjadi perselisihan antara bapak/ibu dengan penggadai?

13. Apakah sistem gadai yang dilakukan mendatangkan keuntungan?

### III. Untuk Pihak Masyarakat Umum

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang gadai?
2. Bagaimana praktik gadai yang terjadi di karossa?
3. Bagaimana keadaan ekonomi pihak yang melakukan gadai baik dari penggadai atau penerima gadai?
4. Apakah yang menjadi faktor pendorong dalam melakukan akad gadai?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang akad gadai yang terjadi di Karossa?
6. Apa tindakan penggadai dan penerima gadai ketika penggadai tidak dapat mengembalikan pinjamannya setelah jatuh tempo pinjaman?
7. Bagaimana kedudukan barang gadai? Apa hak yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai?
8. Apakah dalam pelaksanaan gadai ada masyarakat yang diundang sebagai saksi dan menggunakan surat perjanjian?
9. Apakah ada istilah khusus mengenai gadai kebun kelapa sawit di Karossa? Sejak kapan praktik gadai kelapa sawit terjadi di Karossa?
10. Apakah pernah terjadi perselisihan antara penerima gadai dan penggadai?

**DAFTAR INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Bertindak Sebagai</b>
1	Arifuddin	Petani + Pedagang	Murtahin
2	Wahyu Agung Setiawan	Petani	Masyarakat Umum
3	Darmawati	IRT	Masyarakat Umum
4	Muhammad Mujaki	Petani	Rahin
5	Rustino	Petani	Masyarakat Umum
6	Suherno	PNS	Rahin





(1)

Foto dengan Informan Bapak Arifuddin.



(2)

Foto dengan Informan Saudara Wahyu Agung Setiawan.



(3)

Foto dengan Informan Ibu Darmawati.



(4)

Foto dengan Informan Muhammad Mujaki.





(5)

Foto Informan Bapak Rustio.



(6)

Foto Informan Bapak Suherno.

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifuddin  
Pekerjaan : petani pedagang  
Alamat : karossa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, 23 September 2018

Penerima Gadai



( Arifuddin )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Agung Setiawan  
Pekerjaan : Pebani  
Alamat : Karossa


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, 23 September 2018  
Masyarakat

  
( Wahyu A.S. )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darmawati  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : karossa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, September 2018  
Masyarakat



( Darmawati )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Mujati  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Karossa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, September 2018  
Penggadai



( M. Mujati )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rustino  
Pekerjaan : Tenai  
Alamat : karossa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, September 2018  
Masyarakat



( Rustino )



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SUHERNO**  
Pekerjaan : **PNS**  
Alamat : **MORA IV**

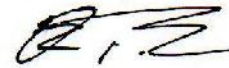
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Alauddin Makassar

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

Karossa, 21 September 2018  
Penggadai

  
( **SUHERNO** )



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Nomor : 52/Tahun 2018**

**T E N T A N G**  
**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Annisa Maulana Ganda Sari : 90100114076 Tertanggal 05 Maret 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Permintaan Tanah Gada di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**M E M U T U S K A N**

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag
2. Sirajuddin, S.EI, M.E
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 7 Maret 2018

Dekan,

**PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag**  
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Siti Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limapo No.36, Romangpolong – Gowa Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221460

Nomor : ~~S48~~ FEB.I/PP.00 9/08/2018 Samara, 07 Agustus 2018  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal  
90100114076/Annisa Maulana Ganda Sari

Kepada Yth :

1. Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
2. Sirajuddin, S.EI., M.E. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

AssalamuAlaikum Wr. Wb

Bersamaini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat / 10 Agustus 2018  
Waktu : 09.00 – 12.00  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan  
Karessa Kabupaten Mamuju Tengah  
Tempat : Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terimakasih

Wasalam,



Prof. Dr. H. Asmo Asse, M.Ag

199410221987031002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 5593 /EB.I/PP.00.9/8/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 14 Agustus 2018

Kepada,

**Yth. KESBANGPOL Kab. Mamuju**

di Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
NIM : 90100114076  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BTN Garaganti Graha Blok II.4

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

**“Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”**

Dengan Dosen pembimbing: 1. Drs. Urbanus Uma Len, M.Ag  
2. Sirajuddin, S.EI., ME.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**NOMOR : 00092/76/RP-PTSP.BA/III/2018**

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
- Menimbang** :
- Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN Nomor 5593/EB.I/PP.00.9/8/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

- Nama / Objek** : Annisa Maulana Ganda Sari
- NIM** : 90100114076
- Alamat** : Mora IV Kec. Karossa Kab. Mamuju
- Untuk** :
- 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data berjudul PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH MURTAHIN DI KECAMATAN KORASSA KABUPATEN MAMUJU TENGAH
  - 2) Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN KAROSSA
  - 3) Waktu / Lama Penelitian : 27-08-2018 s/d 27-09-2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju

Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selaku Administrator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**H. Bahtiar HS, SE, MH**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 196207071992081002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju Tengah di Mamuju Tengah;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah;
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Camat Karossa di Karossa;
7. Pertinggal





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1148 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Annisa Maulana Ganda Sari : NIM: 90100114076
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 

<b>Ketua</b>	: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
<b>Sekretaris</b>	: Nurmiah Muin, S.I.P., MM.
<b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>	: Siti Aisyah, S.Ag., M.Ag.
<b>Penguji Dasar Ekonomi Syariah</b>	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
<b>Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah</b>	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
<b>Pelaksana</b>	: Nurmiah Muin, S.I.P., MM.
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 18 Juli 2019

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax. 8221400

Nomor : **2878** /EB.1/PP.00.9/8/2019  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, **12** Agustus 2019

Kepada Yth  
 Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
 D-  
 Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Annisa Maulana Ganda Sari  
 NIM : 90100114076  
 Jurusan : EKONOMI ISLAM  
 Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murtahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah  
 Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2019  
 Waktu : 14.00 - 15.00 WITA  
 Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1407 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Annisa Maulana Ganda Sari, NIM : 90100114076  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Annisa Maulana Ganda Sari, NIM: 90100114076** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
**Sekretaris** : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.  
**Pembimbing** : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
**Pembimbing II** : Sirajuddin, S.EI., M.E  
**Penguji I** : Dr. Hj. Rahmawati Mulin, M.Ag.  
**Penguji II** : Memen Suwandi, SE., M.Si  
**Pelaksana** : Nurmiah Mulin, S.I.P., MM.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 9 Agustus 2019

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19561022 198703 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 2038 /EB.1/PP.00.9/8/2019

Samata 21 Agustus 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. W'b.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama	: Annisa Maulana Ganda Sari
NIM	: 90100114076
Jurusan	: EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi	: "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Murutahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 22 Agustus 2019
Waktu	: 09.00 - 12.00 Wita
Tempat	: Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.



Ket. Dr. H. Ilyas, M.Ag.

NIP. 196803011993031003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1480 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca :** Surat permohonan : **Annisa Maulana Ganda Sari**  
NIM : **90100114076**  
Tanggal : **14 Agustus 2019**  
Mahasiswa Jurusan : **EKONOMI ISLAM**
- Menimbang** Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul **"Pemanfaatan Barang Gadaul oleh Murahin di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah"**  
Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
- Mengingat** 2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
  8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 S Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : **Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**  
**Sekretaris** : **Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**  
**Penguji I** : **Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.**  
**Penguji II** : **Wemen Sawandi, SE., M.Si**  
**Pembimbing I** : **Dr. Urbanus Uma Luu, M.Ag.**  
**Pembimbing II** : **Shajuddin, S.EI., ME.**  
**Pelaksana** : **Nuriah Muin, S.I.P., MM.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
  4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di : **Samata-Gowa**  
Pada tanggal : **20 Agustus 2019**  
Dekan,

  
**Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**  
**NIP. 19681130199031003**

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ANNISA MAULANA GANDA SARI, dilahirkan di Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Pada tanggal 03 Juli 1997. Merupakan anak ke 2 dari dua bersaudara dari pasangan Suherno dan Ti'at Nurhaeni. Perjalanan pendidikan penyusun dimulai pada tahun 2002-2008 bersekolah di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Karossa yakni di SDI Mora IV, kemudian penyusun melanjutkan pendidikan menengah awal di sekolah MTS Miftahul Ulum Toabo Pada tahun 2008-2011, Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah atas di MA Miftahul Ulum Toabo pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penyusun melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Ekonomi Islam dan penyusun menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R